



# Anggota Komisi III Tak Dilibatkan

## ■ Permintaan Lahan Pelabuhan Benoa Dipertanyakan

DENPASAR, TRIBUN BALI- Rencana barter lahan 4,8 hektare dengan rekomendasi dari Wali Kota Denpasar dipertanyakan anggota komisi III DPRD Denpasar. Selain mengaku tak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai permintaan lahan di Pelabuhan Benoa, para legislator ini juga mempertanyakan legalitas barter tersebut.

Adanya wacana Denpasar dapat lahan 4,8 hektare dalam pengembangan Pelabuhan Benoa menuai pertanyaan dari anggota Komisi III DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra. Selain protes terhadap sikap tertutup tim kecil, politikus partai Demokrat ini juga mempertanyakan dasar-dasar pemberian lahan seluas 4,8 hektare untuk Denpasar itu. Dia khawatir lahan tersebut malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

"Pertanyaan saya satu, kalau memang ada komisi III di sana, kenapa saya selaku anggota Komisi III tidak pernah sekalipun dilibatkan? Dewan kan sifatnya kolektif kolegial?," terangnya, kemarin. Bukan hanya dia saja, para legislator lain juga tidak dilibatkan. "Saya juga sudah tanya ke teman-teman di komisi III, se-

muanya tidak tahu," terangnya.

Susruta juga pertanyakan mengenai permintaan lahan dari Denpasar kepada pengelola Pelabuhan Benoa yang dalam pembicaraan awal akan diberikan lahan 4,8 hektare ke Denpasar asalkan mau memberikan rekomendasi pengembangan Pelabuhan Benoa. "Terus ada pemberian lahan itu dasarnya apa? Kalau tidak ada dasar dan hanya main anaknya dapat segini segitu kan gampang diselewigkan ya?" ujarinya.

Ketut Suteja Kumara, yang ikut dalam tim kecil soal pengembangan Pelabuhan Benoa menjelaskan dirinya mengetahui adanya tawaran lahan seluas 4,8 hektare untuk Pemkot Denpasar waktu dia mengikuti rapat. Saat dipresentasikan, rupanya ada titik yang sudah dicanangkan untuk Denpasar, yaitu lahan seluas 4,8 hektare.

Masalah siapa yang bakal memanfaatkan lahan tersebut--apakah atas nama

BERSAMBUNG ◉ HAL 7

## Sudah Ada Reklamasi?

**INFORMASI** yang dihimpun, di Pelabuhan Benoa yang awalnya 52 hektare, kini telah diurug diam-diam menjadi 91 hektare. Padahal, harusnya sebelum rencana induk pelabuhan (RIO) Benoa mendapat rekomendasi Wali Kota Denpasar, reklamasi belum boleh dilakukan. Namun kabarnya reklamasi telah berlangsung seluas 39 hektare di kawasan Pelabuhan Benoa.

Dikonfirmasi terkait reklamasi yang telah berlangsung di Pelabuhan Benoa, Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Supriyono, tidak

menjawab. "Takut saya disalahkan Pemkot nanti. Mending tanya Pelindo sajalah. Nanti takut salah saya," kata Supriyono.

Namun Supriyono membenarkan nantinya bakal ada reklamasi dalam pengembangan Pelabuhan Benoa. Dia mengaku setelah proses RIP selesai dan disetujui dalam bentuk rekomendasi oleh Pemkot Denpasar, nantinya reklamasi bakal dilaksanakan. "Iya nanti satu-satu dulu. Kalau RIP jadi, baru ada reklamasi. Amdalnya dan lain lain. Sekarang masih proses semuanya," kata Supriyono. (win)

Edisi : Senin, 24 April 2017

Hal : 8





### Anggota Komisi III...

● DARI HALAMAN 8

institusi Pemkot Denpasar atau pribadi--nada suara Suteja langsung meninggi. Politikus PDIP Denpasar, ini enggan terlalu menanggapi pertanyaan satu ini. "Ya harusnya atas nama pemerintahan, bukan atas nama pribadi. Saya tidak tahu persis ya soal itu, saya tidak ingin berpikir negatif, yang positif sajalah," kata pria yang juga menjabat selaku Bendahara Partai PDIP Perjuangan Kota Denpasar itu.

Ditanya mengapa dari pihak DPRD Denpasar yang dilibatkan hanya Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III saja? Dia mengaku pihaknya dalam tim kecil tersebut tidak ada kewenangan soal mengubah kebijakan, melainkan pihaknya bersama dengan Nyoman Eko Supriyani--politikus PDIP Denpasar Ketua Komisi III--hanya sebatas memantau apakah semua proses sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

"Itu bagian dari penyelesaian teknis. Kami pun di situ tidak memiliki kewenangan lain. Tugas kami bagaimana yang itu tidak bertentangan dengan aturan," jelas Suteja.

Berdasarkan hasil pertemuan Kamis (13/4) lalu, Suteja membeberkan zona-zona yang bakal ada dalam hasil pengembangan Pelabuhan

Benoa itu--berdasarkan isi dari Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang masih harus mendapat persetujuan dari Wali Kota Denpasar.

Zona-zona itu, antara lain zona pelabuhan penumpang, pelabuhan peti kemas, pelabuhan ikan, dan sisanya adalah zona komersil. Total luas lahan dalam RIP, kata Suteja, seluas 143 hektare. Namun, Suteja enggan mengungkapkan berapa luas zona komersil yang bakal dibangun.

Melihat adanya zona komersial yang ditawarkan kepada Pemkot Denpasar seluas 4,8 hektare, hal inilah yang mendasari dirinya kenapa tidak lebih dari itu Denpasar diberikan kewenangan mengelola.

"Justru saya melihat adanya zona komersial, yang tidak menjadi bagian tugas pelayaran dan pelabuhan kenapa tidak diberikan kepada Denpasar?" kata Suteja.

Informasi yang dihimpun, Pemkot Denpasar tidak ingin hanya dapat 4,8 hektare saja, melainkan minimal 20 persen dari luas lahan yang ada. Sebab, Pemkot Denpasar berkaca pada apa yang telah dilakukan di daerah-daerah lain, seperti di Surabaya. "Masak cuma 4,8 hektare," kata sumber *Tribun Bali* di internal Pemkot Denpasar. (win)

Edisi : Senin, 24 April 2017

Hal : 7